

### **BAB III**

## **KEPENTINGAN RUSIA TERHADAP AMERIKA SERIKAT DALAM PEMILIHAN PRESIDEN AMERIKA SERIKAT TAHUN 2016**

Tidak ada satu pun Negara yang ada di dunia dapat memenuhi kebutuhan negaranya dengan baik tanpa menjalin kerja sama dengan subjek hukum internasional lainnya, khususnya Negara. Begitu pun dengan Amerika Serikat yang merupakan Negara superpower, perlu untuk menjalin hubungan internasional dengan Negara-negara lain yang ada di dunia. Dalam melakukan hubungan internasional dengan Negara lain dalam berbagai bidang khususnya hubungan diplomatik, para pejabat memiliki wewenang untuk menjadi wakil dari Negara nya. Hubungan diplomatik yang dilakukan oleh para pejabat atau para diplomatik sangat dibutuhkan untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama antarnegara. (Sefriani, 2015) Memperkuat hubungan persahabatan dengan menjalin kerja sama dengan Negara-negara lain, tentu dilakukan untuk mendapatkan kepentingan nasional atau tujuan yang diinginkan oleh Negara tersebut.

Hubungan timbal balik dan saling menguntungkan merupakan faktor penting dalam politik luar negeri. Menurut Joseph Frankel, hubungan antara Negara dipengaruhi oleh *net achievement capability*, yaitu hubungan antara tujuan dan kemampuan yang dapat menentukan apa yang ingin diperoleh oleh suatu Negara dalam wilayah eksternalnya. (Mas'oed, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, 1990)

Perang Dingin antara kedua Negara adikuasa yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang terjadi pada 1947 sampai 1991. Perang Dingin berawal dari strategi Uni Soviet yang ingin menguasai Eropa Timur baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Selain itu, Uni Soviet juga mempengaruhi Negara tetangga seperti Finlandia dan Afghanistan. Kekuatan-kekuatan baik dalam bidang politik maupun ekonomi yang dilakukan Uni Soviet tersebut kemudian membuat Negara-

negara berkonfrontasi terutama Negara barat, hingga akhirnya memicu timbulnya Perang Dingin. (Saputra, Dari Uni Soviet Hingga Rusia : Sejarah Panjang, Para Aktor Revolusi, Serta Politik Perang Dingin Rusia Sampai Sekarang, 2014)

Setelah Perang Dingin berakhir, bukan berarti berakhir pula konflik antara kedua Negara adikuasa Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pergantian ideologi Uni Soviet dari Marxisme dan Komunisme yang dilihat sudah tidak efektif lagi dalam mengontrol ekonomi maupun politik Uni Soviet berganti menjadi sosialisme demokratik dan liberalisme. Strategi Amerika Serikat berhasil melalui *containment policy* dalam menghadapi lawannya yaitu Uni Soviet. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat yang identik dengan ideologi liberalisme dan kapitalisme. Dimana liberalisme dan kapitalisme merupakan ideologi yang unggul hingga saat ini. (Saputra, Dari Uni Soviet Hingga Rusia : Sejarah Panjang, Para Aktor Revolusi, Serta Politik Perang Dingin Rusia Sampai Sekarang, 2014)

Setelah Uni Soviet runtuh atau Rusia resmi menjadi Negara Federasi Rusia, hubungan baik justru terjalin antara kedua Negara itu. Mulai dari kepemimpinan presiden pertama Rusia Boris Yeltsin dan presiden Bill Clinton pada tahun 2001. Kemudian pada kepemimpinan presiden Vladimir Putin, Rusia secara demonstratif memberikan dukungan dan mengikuti jejak dari diplomasi Amerika Serikat yang pada saat itu dibawah kepemimpinan presiden George W. Bush. (Ziegler, 2018)

Pada kenyataannya, setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia mengalami keterpurukan baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Dan itu artinya kepentingan nasional atau tujuan utama dari Rusia adalah untuk mengembalikan Negaranya menjadi Negara yang hebat seperti halnya pada masa Uni Soviet dan dapat meningkatkan sistem politik dan ekonomi Rusia menjadi lebih baik. Reformasi baik dalam bidang politik maupun ekonomi terus dilakukan mulai dari presiden pertama Rusia yaitu Boris Yeltsin, Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, dan akhirnya kembali ke Vladimir Putin

lagi. Banyak capaian telah didapat oleh Rusia untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah warisan dari Uni Soviet, terutama pada masa kepemimpinan Vladimir Putin.

#### **A. Hubungan Amerika Serikat dan Rusia Sampai Terjadinya Pengusiran Diplomat.**

Pada bulan Maret hingga Oktober 1986 hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengalami sederetan kejadian pengusiran diplomat Amerika Serikat oleh Uni Soviet karena tuduhan sebagai mata-mata dan intelijen yang dimuat dalam berita New York Time dan Washington Post. Tindakan pengusiran diplomat yang dilakukan oleh Uni Soviet ini kemudian dibalas oleh Amerika Serikat. Akhirnya Amerika Serikat mengusir 25 diplomat Uni Soviet di PBB dan 50 diplomat Uni Soviet yang ada di Kedutaan Besar di Washington DC. (Widodo, 2012)

Tipe-tipe kejahatan atau pelanggaran yang dapat mengakibatkan seorang diplomat menjadi orang-orang yang tidak diinginkan atau *persona non grata* oleh Negara penerima adalah (Widodo, Hukum Kekebalan Diplomatik Era Globalisasi, 2012) :

1. *Firearms, offences;*
2. *Rape, incest, serious case of incident assault and others serious sexual offences;*
3. *Fraud;*
4. *Second drink/driving offences (or first aggravated by violence or injury to a third party);*
5. *Other traffic offences involving death or serious injury;*
6. *Driving without third insurance;*
7. *Theft including large scale shoplifting (first case);*
8. *Lesser scale shoplifting (second case);*
9. *Any others normally carrying a prison sentence of more than 12 months.*

Diplomasi Rusia cukup idealis pada tahun-tahun pertama presiden Boris Yeltsin. Hubungan bilateral antara Rusia dan Amerika Serikat terjalin dengan baik setelah runtuhnya Uni Soviet. Presiden Rusia Boris Yeltsin dan

presiden Amerika Serikat Bill Clinton membangun hubungan persahabatan yang akrab dan bertemu hingga delapan belas kali selama delapan tahun menjabat sebagai presiden. (Ziegler, *Russian Diplomacy : Challenging the West*, 2018)

Ketika industri minyak dan gas Rusia berada dalam keadaan yang kacau setelah runtuhnya Uni Soviet, hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia terbatas pada visi yang melekat pada perusahaan minyak besar di Amerika Serikat. Dalam tahun-tahun terakhir Boris Yeltsin menuju Vladimir Putin fokus Amerika Serikat yaitu pada masalah sumber daya energi Rusia. (Aggarwal & Govella, *Responding to a Resurgent Russia : Russia Policy and Responses From the European Union and the United States*, 2012)

Masalah pertahanan rudal merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi Vladimir Putin karena implikasinya tidak hanya pada hubungan antara Rusia dengan Amerika Serikat dan Rusia dan NATO tetapi juga pada perencanaan militer. Dimana Rusia khawatir akan dampak dari pertahanan rudal terhadap kemampuan Rusia serta untuk mempertahankan diri. Setelah pemilihannya sebagai presiden Rusia, Putin bertemu dengan Clinton pada Juni 2000 dan salah satu masalah yang dibahas adalah pertahanan rudal. Dalam sebuah pernyataan, mereka sepakat bahwa ada peningkatan ancaman negara-negara yang menggunakan rudal balistik dan bahwa ancaman muncul terhadap keamanan ini dan harus diselesaikan melalui kerja sama timbal balik dan saling menghormati kepentingan keamanan masing-masing. Rusia meratifikasi perjanjian START II, tetapi meratifikasi dengan pemahaman bahwa Rusia tidak akan mematuhi START II jika Amerika Serikat tidak berpartisipasi lagi dalam perjanjian ABM atau *Anti-Balistic Missile* pada tahun 2000. (Pacer, *Russian Foreign Policy under Dmitry Medvedev, 2008-12*, 2016)

Pada tahun 2001, George Bush menjabat sebagai presiden Amerika Serikat dan menjelaskan bahwa Amerika Serikat bermaksud untuk bergerak maju dalam pertahanan rudal serta perjanjian ABM tidak akan menjadi penghalang bagi rencana-rencana ini. Menurut Putin pada Juni 2001,

terdapat 30 perjanjian di bidang keamanan yang terhubung dengan perjanjian ABM dan oleh karena itu Amerika Serikat yang meninggalkan atau mengabaikan perjanjian ABM ini juga akan memiliki implikasi untuk perjanjian lainnya juga. Tanggapan Putin mengenai Amerika Serikat yang meninggalkan perjanjian ABM yaitu Putin mengatakan bahwa keputusan Amerika Serikat tersebut merupakan keputusan yang salah, namun keputusan tersebut tidak akan berpengaruh pada keamanan Rusia. Pada tanggal 24 Mei 2002, sebulan sebelum pencabutan perjanjian ABM Amerika Serikat diberlakukan, perjanjian Moskow ditandatangani yang merupakan perjanjian yang mewakili penghentian dari perjanjian nuklir sebelumnya. Bagi Putin, perjanjian baru ini merupakan langkah penting untuk kedua Negara yang secara khusus bertanggung jawab atas keamanan internasional. Selain itu, pada bulan yang sama kedua presiden membuat deklarasi bersama yang mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Rusia sepakat untuk mengimplementasikan sejumlah langkah yang bertujuan untuk memperkuat kepercayaan dan meningkatkan transparansi di bidang pertahanan rudal, agar dapat bertukar informasi yang relevan, dan melakukan studi tentang bidang-bidang potensial kerja sama pertahanan rudal. (Pacer, Russian Foreign Policy under Dmitry Medvedev, 2008-12, 2016)

Setelah serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat, Rusia dibawah kepemimpinan presiden Vladimir Putin secara demonstratif memberikan dukungan dan mengikuti jejak dari diplomasi Amerika Serikat yang pada saat itu dibawah kepemimpinan presiden George W. Bush. Namun, pada tahun 2003, dengan invasi Amerika Serikat ke Irak dan suksesnya revolusi warna di Georgia, Ukraina, dan Kirgistan sehingga membuat pengaruh dari presiden George W. Bush mulai melemah, kebijakan dari Rusia bergeser menjadi konfrontasi. Diplomasi Rusia kemudian menjadi lebih agresif dimana hal tersebut tergambar dari pendekatan yang dilakukan oleh pribadi presiden Vladimir Putin sendiri. Diplomasi Rusia menjadi sangat realistis dalam orientasi baik

berorientasi pada kekuatan maupun membela kepentingan nasional Rusia sendiri. Tujuan utama dari diplomatik Rusia adalah kesetaraan dan rasa hormat dalam urusan luar negeri sedangkan strategi yang digunakan dalam diplomatik Rusia yaitu hubungan timbal balik. (Ziegler, *Russian Diplomacy : Challenging the West*, 2018)

Reaksi gugup Kremlin terhadap tekanan demokratisasi Barat dan revolusi warna yang terjadi di Negara-negara bekas Uni Soviet dan Balkan karena sistem politik dari Rusia yang rapuh. Revolusi warna sangat didukung oleh negara-negara Barat. Merasa tidak aman Rusia berusaha melakukan segala upaya untuk menstabilkan lingkungan politiknya dan meminimalkan gangguan luar. Putin menekankan pada hak Rusia untuk memutuskan sendiri langkah yang diambil untuk bergerak menuju demokrasi dan Putin juga memperingatkan untuk menggoyahkan sistem politik dengan segala cara baik itu melanggar hukum. Situasi berubah pada tahun 2002-2003 ketika persepsi keamanan Rusia bergeser dalam melihat kebijakan nuklir Amerika Serikat yang diarahkan terhadap Rusia. Kremlin melihat rencana Washington untuk mengerahkan unsur-unsur sistem pertahanan rudal lebih dekat ke perbatasan Rusia sebagai ancaman langsung dan penyimpangan dari perang melawan teror. (Aggarwal & Govella, *Responding to a Resurgent Russia : Russia Policy and Responses From the European Union and the United States*, 2012)

Pada tahun 2006, Rusia menggunakan strategi baru yaitu diplomasi jaringan. Diplomasi jaringan ini pertama kali dikembangkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Lovrov, yang ditujukan agar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan tidak ditujukan untuk Negara bagian atau organisasi-organisasi tertentu. Bentuk utama yang ditentukan oleh Lovrov adalah kemitraan segitiga Rusia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Bagi Rusia, diplomasi jaringan ini sama dengan tujuan utama Rusia yaitu menjauhkan tatanan global dari dominasi Amerika Serikat dan menuju sistem multipolar yang lebih seimbang. (Aggarwal & Govella, *Responding to a*

Resurgent Russia : Russia Policy and Responses From the European Union and the United States, 2012)

Salah satu pejabat Amerika Serikat yang memiliki peran cukup penting dalam mengimplementasikan kebijakan presiden Barack Obama untuk mengatur ulang hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia yaitu Hillary Clinton yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Pada tahun 2009, Hillary Clinton untuk pertama kalinya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov di Swiss. Hubungan Hillary Clinton dan Sergey Lavrov terlihat cukup baik dan ramah walaupun sebenarnya terjadi ketegangan dan ketidakpercayaan antara mereka. Dalam berbagai komunikasi dan pertemuan yang terjadi, Hillary Clinton dan Sergey Lovrov berusaha membuat pertemuan antara Barack Obama dan Dmitry Medvedev untuk membicarakan tentang perjanjian senjata nuklir. (Isikoff & Corn, Russian Roulette the Inside Story of Putin's War on America and the Election of Donald Trump, 2018)

Pada bulan April 2009 dalam pertemuan G20 di London, Barack Obama dan Dmitry Medvedev menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Rusia siap untuk memetakan awal yang baru dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia. Pada bulan Juli 2009 dalam pidatonya selama KTT di Moskow, Barack Obama menegaskan kembali untuk mengatur ulang hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia terutama dalam bidang penyebaran senjata nuklir, mengisolasi dan mengalahkan kekerasan, meningkatkan kemakmuran global, melindungi hak asasi manusia, dan memajukan kerja sama internasional sambil menghormati kedaulatan negara. Dibandingkan dengan era Bush, hubungan Rusia dengan Amerika Serikat kemudian dapat diperbaiki dan tampil dalam kondisi yang cukup baik di bawah Obama. (Singh, Barack Obama's Post-American Foreign Policy the Limits of Engagement, 2012)

Pada bulan September, Barack Obama dan Dmitry Medvedev bertemu kembali pada pertemuan Majelis Umum tahunan Amerika Serikat di New York. Pada saat itu, Dmitry

Medvedev menerangkan bahwa Rusia akan bergabung dengan Amerika Serikat dan Negara-negara barat lainnya sehingga dapat menekan Iran untuk membatasi program nuklirnya. Dimana hal itu merupakan salah satu tujuan utama Amerika Serikat dalam kebijakan mengatur ulang hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia ini, yaitu membuat Moskow sepenuhnya dapat bergabung dan bersama-sama mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. (Isikoff & Corn, Russian Roulette the Inside Story of Putin's War on America and the Election of Donald Trump , 2018)

Pada bulan Maret 2012, saat Vladimir Putin terpilih kembali menjadi presiden Rusia, Putin mengedepankan demam nasionalis dan menindak keras perbedaan pendapat. Melihat hal itu, Hillary Clinton mengirim nota peringatan yang berisikan rekomendasi terhadap gedung putih untuk memikirkan kembali pendekatan baru ke Rusia. Hingga pada Januari 2013, ketika Hillary Clinton siap untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri luar negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton tetap mengirim nota peringatan ke Barack Obama, Hillary menggambarkan bahwa Putin adalah sebuah ancaman bagi tatanan dunia internasional dan juga terdapat nasihat terhadap Barack Obama untuk tidak memberi perhatian yang lebih serta tidak menerima undangan pertemuan yang dilakukan di Moskow sebab Putin lebih mengedepankan kekuatan dari pada kerja sama yang baik. Pada bulan Februari 2013, kepala staf angkatan bersenjata Rusia, Jenderal Valery Gerasimov menerbitkan sebuah artikel yang berisikan rekomendasi agar Rusia dapat menyesuaikan strategi militernya dengan dunia modern. Dalam artikel itu, Gerasimov menuliskan ada cara baru untuk berperang, yaitu informasi. Perang informasi dapat digunakan untuk melawan politik dan ekonomi Negara lain. (Isikoff & Corn, Russian Roulette the Inside Story of Putin's War on America and the Election of Donald Trump, 2018)

Pada tanggal 6 Desember 2012, lembaga legislatif Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang anti-Rusia. Kongres Amerika juga mengesahkan “Magnitsky Act” yaitu



sebagai “langkah penting bagi perlindungan HAM dan demokrasi”. Dalam arti sempit, undang-undang ini ditujukan kepada pejabat Rusia atas tewasnya konglomerat Sergei Magnitsky dalam tahanan pada tahun 2009. Sedangkan dalam arti luas, ditujukan untuk pejabat Rusia yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Vladimir Putin selaku presiden Rusia melihat Magnitsky Act adalah cara Amerika Serikat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia. Perseteruan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin panas dalam masalah politik Timur Tengah dan krisis politik yang dialami Ukraina yang merupakan tetangga dari Rusia. Krisis politik di Ukraina yang ditandai dengan jatuhnya presiden Ukraina Viktor Yanukovich pada bulan Februari 2014. Ukraina merupakan poros geopolitik yang penting dan strategis dalam wilayah Eurasia, yang harus berada dalam pengaruh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya serta Uni Eropa. Menurut Jimmy Carter sebagai arsitek kebijakan politik luar negeri presiden Barack Obama, poros geopolitik adalah Negara-negara yang memiliki lokasi geografis yang cukup penting. (Saputra, Dari Uni Soviet Hingga Rusia: Sejarah Panjang, Para Aktor Revolusi, Serta Politik Perang Dingin Rusia Sampai Sekarang., 2014)

Pada tahun 2016, pada malam pemilihan presiden Amerika Serikat, Barack Obama dengan rasa takut yakin bahwa Trump akan menang. Barack Obama pada saat itu di bawah tekanan dari partai demokrat, kongres dan pejabat dalam pemerintahannya sendiri untuk memberikan perhitungan terhadap apa yang terjadi selama pemilihan oleh Rusia. Komunitas intelijen Amerika Serikat dan CIA menyimpulkan bahwa serangan yang dilakukan Rusia tidak hanya untuk menimbulkan kekacauan namun juga untuk memilih Trump sebagai presiden Amerika Serikat. (Isikoff & Corn, Russian Roulette the Inside Story of Putin's War on America and the Election of Donald Trump, 2018)

Hingga akhirnya pada bulan Juli 2016, kongres Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang yang menjatuhkan sanksi kepada diplomat Rusia dan Obama yang

masih menjabat sebagai presiden Amerika Serikat mengusir diplomat Rusia karena telah mencampuri pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016. (Ziegler, Russian Diplomacy : Challenging the West, 2018)

## **B. Kepentingan Rusia Terhadap Amerika Serikat Dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat Tahun 2016.**

Sebagai Negara pecahan Uni Soviet yang memiliki keterpurukan dalam bidang politik maupun ekonomi, Rusia berusaha untuk melakukan berbagai cara agar dapat menyelesaikan permasalahan dalam negerinya dan mampu mengembalikan Rusia menjadi Negara yang hebat. Hal itu dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh presiden Rusia baik dari presiden Boris Yeltsin, Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, hingga kembali lagi ke Vladimir Putin yang kembali terpilih menjadi presiden Rusia pada tahun 2012.

Tujuan Rusia untuk menyingkirkan pengaruh Amerika Serikat, melakukan upaya untuk membangun blok tandingan Uni Eropa yang bernama Eurasian Union. Pada bulan November 2012, Rusia yang berada dibawah kepemimpinan Vladimir Putin menandatangani kerja sama dengan Belarus dan Kazakhstan sebagai tanda awal dari timbulnya Eurasian Union ini. Hal tersebut membuat Amerika Serikat khawatir dengan upaya yang dilakukan oleh Rusia dan tentunya mendapat dukungan dari Tiongkok. (Saputra, Dari Uni Soviet Hingga Rusia : Sejarah Panjang, Para Aktor Revolusi, Serta Politik Perang Dingin Rusia Sampai Sekarang, 2014)

Rusia mendapatkan sanksi ekonomi bagi perusahaan dan perbankan Rusia yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Bukannya takut, Rusia malah menjadikan hal tersebut untuk membuktikan bahwa Rusia mampu berdiri sendiri dan membalasnya. Pada tahun 2014, presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia mampu membalas dan mengingatkan bahwa Rusia memiliki kekuatan energi yang besar. Pembalasan Rusia akhirnya dibuktikan yaitu dengan menaikkan tarif pasokan gas sebesar 80 persen ke Eropa dan

Ukraina. (Saputra, Dari Uni Soviet Hingga Rusia : Sejarah Panjang, Para Aktor Revolusi, Serta Politik Perang Dingin Rusia Sampai Sekarang, 2014)

Kepentingan Rusia dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016 yaitu agar Rusia dapat dengan mudah mengontrol Amerika Serikat dan dapat mengembalikan kehebatan Rusia sebagai Negara adikuasa. Pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 itu mengeluarkan dua kandidat yaitu Hillary Clinton dari partai demokrat dan Donald Trump dari partai republik. Dalam hubungan Amerika Serikat dengan Negara lain khususnya Rusia kedua kandidat ini memiliki cara yang berbeda, dimana Hillary Clinton siap untuk mengambil langkah tegas terhadap Rusia terkait permasalahan Ukraina sedangkan Donald Trump mengutarakan untuk lebih membangun hubungan diplomatis dengan Rusia, terutama di bidang keamanan nasional. Dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat menjadikan Rusia lebih mudah mengontrol bahkan menguasai Amerika Serikat dibandingkan dengan Hillary Clinton. (Yuliantoro, Prabandari, & Agussalim, 2017)

Dalam buku Craig Unger yang berjudul *House of Trump, House of Putin The Untold Story of Donald Trump and the Russian Mafia*, menjelaskan bahwa mafia Rusia dan operasi intelijen Rusia berhasil menargetkan dan menanamkan aset yang sengaja ditanam Rusia dalam Gedung Putih untuk melemahkan aliansi barat tanpa perang dan tembakan. Selain itu, juga dijelaskan bahwa hubungan antara Donald Trump dan Rusia yang cukup dekat selama empat dekade terakhir. (Unger, House of Trump, House of Putin : The Untold Story of Donald Trump and the Russian Mafia, 2018)

Rusia akan melakukan berbagai cara baik dalam bidang politik maupun ekonomi untuk membangun kembali negaranya menjadi Negara adikuasa yang hebat lagi. Hal yang dilakukan Rusia yaitu seperti meretas musuh-musuhnya baik yang berada dalam negeri maupun di luar negeri seperti halnya ketika meretas email Hillary Clinton dan sekutunya agar bisa merusak kampanye kepresidenannya. Menurut Kantor

Direktur Intelijen Nasional (ODNI), Badan Intelijen Pusat, Biro Investigasi Federal, dan Badan Keamanan Nasional, kegiatan dan niat Rusia dalam pemilu Amerika Serikat disebabkan oleh tujuan Rusia yang ingin merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi Amerika Serikat, merendahkan sekretaris Hillary Clinton, dan merusak potensi kepresidenan Clinton. (Unger, House of Trump, House of Putin : The Untold Story of Donald Trump and the Russian Mafia, 2018)

Tujuan lainnya dari Moskow tentu sejalan dengan tujuan Putin yaitu membawa Amerika Serikat ke dalam krisis politik dan melemahkan pemerintah barat. Alasan lain dari serangan Rusia ini adalah kebencian Putin terhadap Hillary Clinton. Hal ini juga disadari oleh para pejabat Amerika Serikat terhadap operasi Rusia yaitu untuk melemahkan Hillary Clinton selama pemilihan dan mencegahnya untuk menang serta membuat rivalnya untuk berhasil duduk sebagai presiden Amerika Serikat. Menurut analis dan pejabat intelijen hal ini sangat besar kemungkinannya terlihat dari transaksi bisnis Trump dengan Rusia selama bertahun-tahun dan komentar positif Trump terhadap Putin. (Isikoff & Corn, 2018)